

Polisi dan *Community Relations* : Kasus Penanganan Kerusuhan Buruh

Ilham Prisgunanto*

Abstrak

*Kerja polisi harus luwes dan bisa memahami karakter masyarakat yang dilayaninya, sehingga menciptakan ikatan hubungan antara polisi dengan lingkungan sekitar. Berusaha mengenal masyarakat dan memahami komunitas bukanlah sesuatu yang mudah, perlu adanya strategi dan taktik khusus dalam perencanaan komunikasi yang jitu. Praktik yang penentu keberhasilan adalah kemampuan komunikasi antar pribadi dan komunikasi lintas budaya sang anggota. Satu yang dipahami bahwa begitu berdayanya *community relations* ini bila aplikasinya tidak tepat maka akan menghambat dan menggerogoti keberhasilan program perpolisian masyarakat yang berbalik menjadi bumerang menyerang citra diri polisi yang buruk. Penanganan pencegahan sudah sangat urgen untuk melakukan praktik *community policing* dalam penanganan kasus bentrokan, seperti kasus penanganan buruh.*

Kata Kunci : *Polisi, Community Relations, Komunikasi, Pemaknaan, Perpolisian masyarakat*

Pendahuluan

Pada kenyataannya polisi kerap digambarkan negatif oleh masyarakat, hal ini lebih disebabkan karena masyarakat masih banyak yang kurang memahami kerja dari pasukan berbaju coklat ini. Pengerusan citra polisi di masyarakat semakin kentara dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan terjadi juga di berbagai negeri sejalan dengan mencuatnya kritik pedas akan hubungan Negara dengan masyarakat dalam nuansa isu demokrasi dan penjunjangan Hak Asasi Manusia. Satu hal yang perlu dipahami, bahwa di situlah tantangan terbesar kerja dari polisi sebagai pengayom, pembina keamanan dan

penegak hukum bagi masyarakat dalam rangka menerapkan asas keadilan yang sesungguhnya di dalam kehidupan hukum yang sehat dan memenuhi asas keadilan.

Satu yang sudah diketahui bahwa pengerusan citra polisi tidak hanya melulu kepada andil besar dari media massa, melainkan juga kontribusi masyarakat dalam konteks kelompok yang kerap disebut dengan komunitas. Konflik sosial yang muncul kebanyakan dipicu dari keberadaan komunitas yang dominan lebih lanjut dalam mengarahkan perilaku dan sikap masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sedikit banyaknya potensi konflik di masyarakat berasal dari arogansi kelompok khusus (baca komunitas) di masyarakat. Hal inilah yang harus dipahami

* Dr. Ilham Prisgunanto adalah Penulis buku dan Pengajar Komunikasi Sosial di Program Sarjana dan Pascasarjana STIK-PTIK, email: prisgunanto@gmail.com

dalam realitas kehidupan bermasyarakat yang sesungguhnya.

Berangkat dari kesadaran inilah diakui bahwa komunitas memiliki andil besar terhadap sedikit banyaknya pembentuk gambar akan kinerja polisi sebagai institusi publik yang selalu bersentuhan dengan masyarakat. Adanya kesadaran akan keberdayaan atas kekuatan sosial oleh komunitas inilah yang akhirnya mendorong polisi untuk melakukan pembinaan khusus untuk berhubungan dengan komunitas dan kelompok tertentu. Pada banyak literatur kepolisian kerap dijelaskan bahwa Amerika Serikat sendiri mengakui bahwa potensi konflik terbesar di negara Paman Sam itu terletak pada hubungan yang disharmonis petugas kepolisian dengan komunitas minoritas dalam konteks rasialis.

Isu sensitif tentang rasialis di sana tidak pernah surut apalagi sejalan dengan sejarah kelam pertarungan kekuatan politik dalam nuansa warna kulit yang selalu bergejolak dalam hubungannya dengan pengancaman atas keamanan dan ketentraman. Kepolisian Amerika Serikat paham betul, bahwa tantangan dan kendala serius penerapan perpolisian masyarakat di sana adalah menyoal komunitas minoritas yang memiliki potensi kecemburuan dan konflik besar di masyarakat. Rasa tersisihkan terhempas dan diabaikan adalah perasaan yang ada dalam masyarakat minoritas yang ada. Bisa diakui suatu waktu ini bisa menjadi bom waktu yang memunculkan konflik dan gesekan yang ada di masyarakat.

Oleh sebab itu anggota polisi harus memiliki strategi tersendiri dalam menyikapi pola kontroversi kelompok minoritas terutama dalam penanganan dan keputusan kebijakan mereka dalam praktik kerja di lapangan. Di sinilah pengujian sikap bijak dan arif polisi dalam menanggapi potensi gejolak yang mungkin terjadi dari faktor pemicu yang mungkin begitu

mudah disulut dalam komunitas minoritas yang secara strata ekonomi tersisih dari tatanan masyarakat. Pemahaman inilah yang perlu ditancapkan di dalam benak dan perasaan dari anggota polisi dan perlu penanganan serius dalam mengantisipasi potensi konflik yang ada tersebut.

Sejarah Konflik Berkaitan Dengan Komunitas

Bila mau dirunut sudah begitu banyak lintasan sejarah menyebutkan hubungan disharmonis polisi dengan masyarakat yang dilayaninya. Pada tulisan ini akan lebih difokuskan pada hubungan polisi dengan kelompok khusus (rasialis) yang ada di masyarakat. Diakui konflik polisi dengan komunitas memiliki sejarah yang panjang sejak dari masa Perang Dunia hingga teknologi. Ada 3 (tiga) periode menyoal konflik urban rasial dengan polisi. Pertama ada pada Perang Dunia I, Perang Dunia II dan era 1960-an tepatnya pada kerusuhan musim panas. Hampir semua kerusuhan diawali dengan insiden yang melibatkan tindakan sikap polisi yang dianggap tidak sesuai dan pantas dalam kacamata masyarakat.

Di era tahun 1980 pernah pecah kerusuhan di Miami, Florida oleh komunitas kulit berwarna pada Januari 1989 setelah polisi menembak hingga terbunuhnya si pengendara motor berkulit hitam dengan alasan pengendara motor itu adalah pelaku kriminal dalam pengedaran narkoba. Pasca penembakan tersebut terjadi gelombang kerusuhan dan demonstrasi yang menimbulkan kerugian yang tercatat hingga 1 juta dollar pada saat itu. Dari hasil investigasi, diketahui bahwa persepsi anggota polisi secara pervasif dalam operasi kerja melakukan kesalahan bertindak, berlebihan dan berlaku sebagai pasukan pembunuh atau pemukul ketika berhadapan dengan penduduk yang berkulit hitam (khususnya kepada pria berkulit hitam) daripada mereka yang berkulit putih. Hal serupa

juga terjadi beberapa penembakkan Polisi seperti di New York, Houston, Minneapolis dan semuanya berkaitan dengan penduduk berkulit hitam.

Pada dasarnya program polisi - *community relations* adalah penghalusan dari program terdahulu yang pernah ada, yakni ; *polisi-race relations*. Penanganan kasus dalam komunitas di Amerika Serikat yang paling serius adalah sehubungan dengan orang kulit hitam sebagai kaum minoritas dalam masyarakat modern di Amerika Serikat. Masalah kedua komunitas adalah menyoal penanganan polisi terhadap orang Amerika Hispanic yang ada di daerah Los Angeles, Denver, Miami, dan New York. Orang Hispanic adalah sejumlah kelompok orang atau masyarakat yang berasal dari negara Meksiko, Puerto Rico, Cuba, atau orang-orang dari Amerika Tengah dan negara-negara Amerika Latin lainnya.

Sedemikian juga polisi berbenturan dengan penduduk orang asli Amerika Serikat yang sudah menjadi urban dan mereka yang dekat dan tinggal dengan komunitas yang berada dekat di daerah cagar masyarakat Indian. Belum lagi dengan komunitas-komunitas lain yang masih dalam jumlah besar di Amerika Serikat yakni; komunitas orang-orang Asia, seperti mereka yang berasal dari Vietnam, Laos, Kamboja dan Indonesia.

Belum lagi dengan komunitas-komunitas lain yang dianggap terlupakan dan lebih dikenal dengan istilah kelompok pendiam (*muted group*). Sebut saja komunitas yang muncul dan mencuat akhir-akhir ini, adalah mereka yang homoseksual, lesbian dan transgender (wadam/wanita Adam) yang dianggap kurang mendapatkan perlindungan dan tindakan mengenakan dari petugas polisi dalam memberikan layanan yang layak bagi masyarakat.

Pada kenyataannya golongan perempuan terkadang tidak mendapat kelayakan

perlindungan dari kejahatan lingkungan, seperti ; kejahatan pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kerap didapati adanya pemberangusan atas hak-hak mereka yang seharusnya setara dengan kaum adam. Di sinilah yang jelas terlihat tingkat keadilan dan kesetaraan yang diberikan oleh anggota polisi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Opini Publik dan Polisi

Dengan jelas dapat dikatakan, bahwa polisi perlu memahami masyarakat yang mereka layani ketika mereka melakukan kerja. Bukan malah sebaliknya arogan dalam berhubungan dengan masyarakat. Kunci dari hubungan komunitas ini adalah memahami pola dan karakteristik dari masyarakat dimana mereka berhubungan dan bersinggungan. Tentu saja polisi tidak memiliki banyak waktu yang cukup untuk mempelajari secara serius masyarakat yang mereka layani. Jawabannya jelas, dengan menggunakan sarana *polling* publik dapat diketahui keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam berhubungan dengan kerja kepolisian. Polling Publik yang menyoal kerja polisi akan sangat berguna sebagai patokan untuk menganalisis tindakan pola kerja polisi, apa saja yang perlu dilakukan dan digali dalam hubungan polisi dengan masyarakat ketika melaksanakan praktik *community relation*.

Hasil survei ini dengan lugas dapat menjadi tolak ukur yang sesungguhnya, dan sangat baik bila dilakukan secara serentak nasional yang diikuti dengan survei lokal daerah. Dengan demikian maka esensi sesungguhnya survei ini selain berimbas kepada citra polisi juga dapat sepenuhnya digunakan sebagai urgensi membangun hubungan dengan komunitas yang penulis sebutkan di bagian awal tulisan ini. Dari survei ini dengan lugas dapat diketahui apa yang diinginkan oleh komunitas kepada Polri nantinya juga sebaliknya apa yang diinginkan Polri kepada komunitas dan tingkat kebutuhan yang ada. Tentu saja sebagai catatan bahwa polling harus

dilakukan oleh pihak-pihak yang mumpuni (profesional) di bidang tersebut dan memenuhi aspek kebenaran dalam tataran ilmiah.

Para ahli di bidang ilmu dan pengetahuannya menjadi syarat utama pendirian lembaga Polling yang dimiliki kepolisian. Oleh sebab itu aspek independensi lembaga Polling pasti akan dipertanyakan, jangan seperti lembaga polling yang ada saat ini yang dianggap banyak orang kurang obyektif, seimbang dan memenuhi aspek validitas dan reliabilitas karena berpihak pada satu kepentingan saja, baik itu kepentingan untuk berseberangan dengan Polisi atau malah sebaliknya menjadi corong propaganda polisi karena sepenuhnya dibiayai oleh Polri. Bila sedemikian maka lembaga Polling tersebut bukan menciptakan hubungan harmonis polisi dengan masyarakat dengan penguatan komunitas, malah sebaliknya akan memunculkan kemucakan dan kebencian kepada polisi.

Di Amerika Serikat sendiri temuan polling yang dilakukan kepolisian di sana mendapatkan temuan menarik dan sangat sederhana sekali, bahwa komunitas di sana mengharapkan polisi melakukan respon cepat terhadap layanan dan aksi tanggap mereka terhadap laporan dan aduan tindak kriminalitas warga. Hasil polling juga menyebutkan adanya kecurigaan adanya tindakan pilih-pilih terhadap pelaporan dan aduan dari orang kaya dan miskin, juga dari mereka yang berkulit berwarna dengan putih. Sentimen-sentimen ini diakomodasi dan diberikan apresiasi yang penuh oleh kepolisian dengan melakukan pendekatan dan hubungan yang harmonis dengan komunitas-komunitas di sana yang merasa dan menganggap diri mereka teralienasi dan terlempar dari pemenuhan kebutuhan akan layanan polisi. Diakui memang disitulah peran utama dari kerja polisi dalam hubungannya dengan menyamarakan layanan kepada tiap pihak yang ada di masyarakat (Friedmann, 1992:133).

Pemahaman Komunitas (*Community*)

Sejak tahun 1970 telah terjadi pergeseran pemahaman di masyarakat dan organisasi, terutama penerapan organisasi teoritik modern. Paradigma baru organisasi mulai memperhitungkan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Sementara itu mulai digunakanlah pendekatan manajemen strategis. Hal ini berdampak pada cara pandang organisasi bisnis lingkungan eksternalnya. Masyarakat bukan lagi dipandang sekedar kumpulan konsumen yang akan membeli produk dari hasil organisasi, melainkan juga mitra bagi keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya. Selain itu masyarakat juga mulai bisa mengubah cara pandangnya terhadap organisasi bisnis.

Schneider berpendapat serupa, bahwa sebuah organisasi tidak akan bisa menghindari dari pengaruh yang berasal dari komunitas dan lingkungannya. Hal ini disebabkan karena sebuah organisasi berada dalam kelompok sosial yang lebih besar. Oleh sebab itu penyesuaian terhadap lingkungan eksternal akan memberi pengaruh pada lingkungan interna. Komunitas adalah kumpulan individu yang mendiami lokasi tertentu dan biasanya terkait dengan kepentingan yang sama. Makna inilah yang tercakup dalam *community relations*. Dalam kajian *public relations* diketahui bahwa makna komunitas itu bersifat jamak, tidak tunggal. Perubahan sosial membuat perubahan makna dan istilah, bukan sekedar kata komunitas (Wilbur J. Peak dalam Lesly, 1991: 117).

Komunitas berbeda dengan publik, dahulu banyak orang menganggap komunitas bagian dari publik dan lebih dianggap sebagai publik eksternal. Namun pada perkembangan selanjutnya komunitas menjadi meluas dan dianggap *stakeholders* yang dilayani organisasi. Komunitas di sini merupakan *stakeholders* eksternal organisasi yang memiliki hubungan timbal balik

dengan organisasi. Moore menyatakan bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang hidup di tempat yang sama, berpemerintah yang sama dan mempunyai kebudayaan dan sejarah yang umumnya turun temurun. Orang-orang yang hidup dalam komunitas dengan lembaga-lembaganya membuat mereka saling bergantung satu dengan yang lainnya. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang baik tanpa lembaga-lembaga tersebut. Begitu pula lembaga itu hanya dapat hidup dengan ijin dan dukungan mereka.

Suparlan menjelaskan bahwa komunitas adalah permukiman yang merupakan sebuah satuan kehidupan yang menempati sebuah wilayah yang terbatas luasnya, dapat berupa kampung atau dusun, desa atau satuan RT atau RW. Menurutnya anggota-anggota sebuah komunitas dalam batas-batas tertentu saling hubungan satu sama lainnya, terutama melalui jalur kekerabatan atau perkawinan dan berbagai bentuk interaksi sosial untuk berbagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Alhasil sebuah komunitas akan memberi kesan sebagai sebuah satuan kehidupan sosial ekonomi yang menempati sebuah wilayah yang terbatas, walau batas-batas wilayah sebuah komunitas itu longgar karena tidak secara hukum didefinisikan, ini berbeda dengan batas negara atau kota (2005:6).

Moore juga menambahkan, organisasi bisnis akan menjadi lebih penting peran dan kedudukannya di antara lembaga-lembaga komunitas dan masyarakat. Aktivitas bisnis perusahaan mampu membantu komunitas menyediakan pekerjaan tetap, gaji layak, dan keuntungan finansial dengan membeli barang-barang dan jasa dari para pemasok lokal dengan membayar pajak langsung ke Pemerintah setempat. Caranya dengan menyumbangkan proyek sosial dan kebudayaan; dan menjalani semua peran kehormatan sebagai warga yang baik. Dengan demikian, maka lembaga

bisnis yang maju berada pada posisi untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas tersebut (2000:65).

Alasan-alasan inilah, maka suatu organisasi harus menerima tanggung jawab terhadap komunitas di tempat mereka beroperasi. Tidak hanya menyediakan pekerjaan dan membayar pajak, tetapi juga menjadi warga yang baik, berperan aktif dalam kehidupan komunitas; menerima kepemimpinan budaya, membantu pendidikan, meningkatkan kesehatan komunitas, memberantas pelanggaran hukum, bekerja untuk pemerintahan yang berdayaguna, dan memberikan berbagai sarana untuk rekreasi. Sebuah organisasi harus mendorong para stafnya agar lebih meningkatkan dana dan pelayanan bagi organisasi penduduk dan berperan aktif dalam pemerintah setempat.

Dalam konteks kerja jelas, bahwa hubungan komunitas ini erat dengan kerja *public relations* organisasi tersebut. *Public relations* berfungsi manajemen untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang bisa mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Setiap organisasi harus memperhatikan peranan praktisi *Public relations*, karena dalam definisi ini diketahui bahwa *Public relations* memiliki tugas dalam pembentukan pemeliharaan hubungan baik yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publik sebagai basis moral dan etis dari profesi *Public relations*. Dengan jelas *Institute of Public Relations* (IPR) mendefinisikan "Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya".

Lebih lanjut The International Public Relations Association mendefinisikan *Public relations* (Effendi, 2004: 134):

“PR is a management function of a continuing and planned character, through which public and private organizations and institutions seek to win and retain the understanding, sympathy and support of those with whom they are or may be concerned – by evaluating Public opinion about themselves, in order to correlate as far as possible, their own policies and procedure to achieve, by planned and widespread information, more productive cooperation and more efficient fulfillment of their common interest”.

Hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen dari yang dijalankan secara berkesinambungan dan berencana dengan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadi berusaha memperoleh dan membina pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada sangkut pautnya atau yang mungkin ada sangkut pautnya dengan menilai pendapat umum diantara mereka dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan mereka, guna mencapai kerjasama yang lebih produktif dan untuk melaksanakan kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan melancarkan informasi yang berencana dan tersebar luas.

Humas adalah bagian dari kegiatan organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memelihara citra serta membentuk opini yang positif dari masyarakat serta khalayak (publik), agar organisasi itu memperoleh kepercayaan dan sokongan dari masyarakat (publik), baik internal maupun eksternal terutama dari publik di luar organisasi itu. Hal ini ditempuh melalui komunikasi terbuka kepada publik, upaya menyelaraskan kebijakan serta produknya sesuai dengan harapan publik, dan termasuk upaya koreksi perbaikan ke dalam.

Dapat disimpulkan pengertian public relations adalah fungsi organisasi untuk menjaga hubungan baik antara organisasi dengan pihak eksternal melalui komunikasi terbuka yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan. Tujuan utama adalah untuk

menciptakan, memelihara saling pengertian, menyelaraskan kebijakan agar sesuai dengan harapan publik. Public relations menjadi tangan kanan perusahaan untuk menjembatani kepentingan organisasi dengan masyarakat demi kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi. Tentu, tujuan yang ingin dicapai melalui pengertian bersama agar tercipta citra dan pembentukan opini positif.

Dimock Marshall bersama rekan-rekannya, Edward, Gladys, Odgen Dimock dan Louis W. Koenig (Suhandang, 2004: 53) membagi tujuan Public relations menjadi 2 bagian:

1. Dari aspek positif berusaha dan menambahkan penilaian serta jasa baik suatu organisasi atau perusahaan.
2. Secara *defensive* berusaha untuk membela diri diri terhadap pendapat masyarakat yang bernilai negatif, bilamana diserang dan serangan itu kurang wajar, padahal organisasi atau perusahaan itu tidak salah (*miss communication*). Dengan demikian tindakan ini merupakan salah satu aspek penjagaan atau pertahanan.

Cutlip (2009: 11-27) membagi fungsi-fungsi Public relations seperti, hubungan internal, publikasi, *advertising*, *press agency*, *public affairs*, *lobbying*, *management issue*, hubungan investor dan pengembangan. Dengan demikian jelas spesifikasi kerja public relations adalah:

1. Publikasi, informasi dan berita di media yang berasal dari sumber-sumber public relations, tetapi karena sumber-sumber itu tidak membayar atas pemberitaan, maka mereka hanya sedikit atau bahkan tidak punya kontrol apabila informasi tersebut digunakan, kapan informasi tersebut dipakai, dan bagaimana informasi itu digunakan, atau disalahgunakan oleh media. Sumber-sumber public relations menyediakan informasi yang mereka anggap pantas

untuk diberitakan, yang disebut publikasi, dengan harapan editor dan reporter akan menggunakan informasi tersebut.

2. *Press Agency*, penciptaan berita dan peristiwa yang bernilai berita untuk menarik perhatian media massa dan mendapatkan perhatian dari publik.
3. *Public Affairs*, bagian khusus dari public relations yang membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dan komunitas lokal dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik.
4. *Lobbying*, bagian khusus dari public relations yang berfungsi untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan pemerintah terutama dengan tujuan mempengaruhi penyusunan undang-undang dan regulasi.
5. *Management Issue*, proses proaktif dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi dan merespon isu-isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan organisasi dengan publik mereka.

Bertrand R. Canfield (dalam Suhandang, 2004: 54) menambahkan :

- *It should serve the public interest,*
- *Maintain good communication,*
- *Stress good morals and manners.*

Dengan jelas maka diketahui inti dari fungsi Public relations menurut Bertrand seharusnya dapat melayani keinginan publik agar mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak, kemudian menjaga jalinan hubungan dengan berkomunikasi yang baik, terakhir public relations dapat menunjukkan moral dan perilaku organisasi yang baik pula.

Kasus Pergerakan Buruh dan Kerusuhan Massa

Kasus menarik yang bisa dijadikan contoh kasus dalam *community relations* polisi ini bagi

penulis bukan pada mereka yang terdeskriminasi dalam konteks teritorial, melainkan mereka yang tersisih dalam konteks sosial ekonomi dalam hubungannya dengan pertarungan identitas dan kredibilitas dalam hegemoni angkatan kerja yang ada. Mereka yang merasa tidak dihiraukan oleh Pemerintah dan menjadi kaum terhina dalam angkatan kerja yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata dan masuk dalam barisan kalangan miskin dan kekurangan.

Perhatikan berita kasus kerusuhan buruh di bawah ini;

Belasan Buruh Ditangkap Setelah Bentrok di Banten

Senin, 19 Desember 2005 | 15:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan buruh di depan kantor gubernur Banten, Senin (19/12), rusuh. Para demonstran terlibat saling pukul dengan aparat kepolisian. Sejumlah demonstran terluka, 13 orang ditangkap. Insiden berawal saat sekitar 5.000 buruh anggota Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten datang ke kantor Pemerintah Provinsi Banten, Senin pagi. Mereka menuntut agar Ratu Atut Chosiyah, pelaksana tugas Gubernur Banten, mencabut surat ketetapan upah minimum provinsi sebesar Rp 690 ribu per bulan. Sekitar pukul 10.30 Wib ribuan buruh ini merapat di depan gerbang masuk kantor Gubernur. Dengan pengawalan ketat petugas, di tempat ini buruh berorasi. Mereka menuntut agar upah minimum dinaikkan menjadi Rp 1,2 juta per bulan. Selang beberapa saat, sejumlah buruh bergerak dan berusaha masuk ke halaman kantor gubernur. Tapi, mereka dihalangi ratusan aparat kepolisian dan polisi pamongpraja yang sudah membuat pagar betis.

Aksi dorong-dorongan berubah menjadi saling pukul antara pendemo dan polisi. Ribuan pendemo yang merangsek ke kerumunan petugas. Demonstran juga melempari polisi dengan batu

dan bambu. Tindakan ini dibalas oleh petugas dengan memukul pendemo hingga salah seorang pendemo berdarah di bagian kepalanya. Aksi ini mereda setelah pendemo mundur dari kerumunan. Aksi saling pukul ini berlangsung beberapa kali. Tercatat 13 orang pendemo ditangkap petugas karena dinilai memprovokasi untuk melakukan tindakan anarkhis. "Mereka kami amankan (tangkap) karena sudah memprovokasi," kata Sriyanto, anggota Polda Banten. Hingga kini, ribuan buruh masih bertahan di halaman kantor gubernur Banten. Sementara beberapa perwakilan pendemo yang diberikan masuk ke pendopo masih menunggu kedatangan Ratu Atut Chosiyah. Faidil Akbar

<http://www.tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2005/12/19/brk,20051219-70839,id.html>

Memaksa demo di depan pabrik, buruh & polisi bentrok

Pramono Putra

Rabu, 22 Mei 2013 – 12:39 WIB

Sindonews.com - Aksi demo menuntut pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten di Sidoarjo berlangsung ricuh. Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) terlibat bentrok dengan polisi. Akibat bentrokan tersebut, tiga orang buruh diamankan petugas kepolisian. Kericuhan bermula ketika perwakilan buruh berusaha memaksa polisi untuk mengizinkan buruh melakukan aksi orasi di depan pabrik plastik PT Surya Indah Plastik di kawasan Tropodo-Waru sebelum mereka melakukan aksi demo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. **Namun aksi tersebut tidak mendapat ijin dari kepolisian sehingga kedua kubu bersitegang.** Ketegangan berlanjut hingga keduanya terlibat baku hantam di depan pabrik plastik tersebut. Kapolres Sidoarjo, AKBP Marjuki yang memimpin langsung pengamanan aksi demo buruh, langsung memerintahkan anggotanya untuk menangkap

tiga orang perwakilan buruh yang diindikasikan sebagai provokator dalam aksi tersebut.

Ia mengatakan, polisi terpaksa melakukan pembubaran paksa karena aksi demo di depan pabrik plastik PT Surya Indah Plastik tidak memiliki ijin. "Kami terpaksa membubarkan buruh karena aksi mereka di depan pabrik plastik itu tidak memiliki ijin dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya," tegas Marjuki di lokasi, Rabu (22/5/2013). Hingga siang ini, tiga perwakilan buruh yang diduga sebagai provokator aksi diamankan polisi di Mapolres Sidoarjo. (ysw)

<http://daerah.sindonews.com/read/2013/05/22/23/751593/memaksa-demo-di-depan-pabrik-buruh-polisi-bentrok>

Dari dua kasus pemberitaan bentrok buruh di atas jelas bahwa ada beberapa kata kunci yang berusaha dicuatkan oleh pers, yakni; menyoal buruh melakukan perlawanan terhadap Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pemda setempat menyoal kenaikan UMD (Upah Minimum Kabupaten atau Daerah). Representasi pelaku industri dianggap sebagai mereka yang menerima kerugian karena karyawan, buruh dan operasi kerja industri mereka mandek karena aksi pemogokan. Di lain pihak sasaran pendemo yakni; Pemerintah daerah tidak ada upaya memediasi atau penenangan kepada buruh (dalam kedua berita ini tidak terlihat sama sekali).

Berbeda dengan itu polisi sebagai aparat penjaga keamanan obyek vital yang dalam hal ini adalah pabrik dan sarana lain begitu berkepentingan untuk menjaga dan memelihara keamanan, kenyamanan dan ketentraman di sana. Bentrok terjadi, dan tetap saja polisi adalah algojo dalam kasus pembubaran pendemo dan buruh adalah pihak pesakitan yang meski dengan berbagai cara melakukan kalah dengan petugas aparat keamanan. Alasan utamanya adalah buruh

melakukan tindakan anarkis dan tidak mendapat ijin dari kepolisian dan instansi terkait. Inilah yang digembar-gemborkan oleh pers dalam pemberitaan kasus bentrokan buruh dengan polisi pada banyak media massa. Isu-isu klasik dan penanganan seragam sedemikian sepertinya menjadi pembenaran atas pola tindakan yang dilakukan oleh polisi sebagai aparat keamanan.

Penanganan Preventif Dari Sudut Pandang *Community Policing*

Jelas dalam kasus bentrok buruh di atas ada keanehan yang sangay kentara yakni buruh melakukan aksi bukan kepada Pemerintah Daerah yang terwakili oleh Polisi Pamong Praja melainkan lebih kepada polisi sebagai pengamanan sarana obyek vital. Padahal jelas keinginan mereka adalah menyoal Upah Minimum Daerah (UMD) yang tidak pernah terealisasi dan yang berwenang adalah Pemerintah Daerah. Bukan itu saja terlihat bahwa pelaku industri sebagai pemberi gaji sepertinya hilang ditelan bumi dalam kasus ini tidak nampak sama sekali.

Tidak ada kebencian kepada pihak manajemen yakni; pelaku industri melainkan mengalir ke arah polisi sebagai representasi Pemerintah yang ada di lapangan saat itu. Pihak polisi dianggap sebagai simbol dari Pemerintah yang dianggap lamban, dan tidak mau mendengarkan keinginan para buruh. Ketika kejadian sudah tidak terkendali maka pola tindak polisi malah menjadi sorotan pemberitaan pers dan terjadi pelencengan terhadap tujuan buruh mendemo adalah menaikkan harga UMD. Tindakan kekerasan dan tidak memahami kondisi dan situasi begitu melekat erat sebagai labelling pada polisi. Mereka hanyalah robot yang tidak memahami situasi dan kondisi yang ada. Sudah dapat dipastikan berita-berita selanjutnya akan menyoal penanganan aparat terhadap aksi bentrokan demonstrasi di sana-sini dan yang menjadi sorotan tajam adalah pernyataan-

pernyataan pimpinan teras, yang dalam hal ini adalah Kapolres dan Kapolsek di lapangan yang dianggap tidak mengetahui sama sekali duduk perkara permasalahan.

Oleh sebab itu perlu penanganan kasus Polisi dalam hubungannya dengan *community relations* yang urgen akan perlunya kondisi fungsional fundamental dari komunitas yang ada dengan mengedepankan tanggungjawab sosial polisi terhadap masyarakat yang dilayani. Di satu sisi polisi harus dapat menciptakan keamanan dan ketentraman pekerja sehingga bisa muncul produktivitas yang memang diharapkan oleh semua pihak. Di lain sisi Pengusaha dihimbau untuk tidak hanya mencari keuntungan melainkan perlu dukungan buruh untuk ikut menciptakan kondisi aman, tentram dan penuh dengan kedamaian dalam menciptakan hasil produk yang diinginkan.

Nyata bahwa kerja Polisi kurang luwes dan banyak terpaku pada sistem baku aturan yang sudah ada. Padahal tindakan di sini baik sosialisasi maupun advokasi harus proaktif dengan melakukan pendekatan *door to door* dalam kelompok-kelompok kecil yang terkena diskriminatif di masyarakat. Dengan pendekatan kepada komunitas yang dalam hal ini buruh caranya adalah dengan menyadarkan akan kerja polisi dari pola perpolisian masyarakat yang ada. Dengan demikian buruh memahami apa dan bagaimana kerja polisi? Kapan mereka melakukan aksi paksa dan persuasi pada tindakan demostran.

Bila ada pendekatan secara personal maka akan ada ikatan-ikatan emosional yang muncul, tentu saja dengan demikian akan meruntuhkan simbolisasi liar bahwa polisi adalah representasi Pemerintah Daerah. Penyadaran ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan komunitas buruh yang diwakili oleh pemimpin dan juru bicara buruh yang biasanya terwakili dari forum-forum atau ikatan solidaritas yang

ada. Tidak adanya penyimpangan pada peran dan lakon buruh, polisi, Pemerintah daerah dan pelaku industri akan memberikan ruang kepada buruh untuk menilai tindakan anarkis mereka yang dianggap oleh banyak pihak.

Adanya ikatan emosional, bukan berarti malah menjadikan buruh sebagai polisi atau masuk dalam organisasi polisi. Tindakan keliru itu pernah dilakukan oleh Kepolisian Amerika Serikat yang menambah jumlah orang kulit hitam daerah rawan menjadi polisi. Alhasil bukannya malah menurunkan aksi kekerasan dan penyimpangan kekuasaan polisi malah memperbesar. Adanya penolakan dari lingkungan terhadap polisi dari golongan mereka menyebabkan polisi dari golongan mereka lari dan berperilaku lebih brutal dari polisi yang sudah-sudah. Atau dalam bahasa mudahnya malah berlebihan dari polisi yang sudah ada.

Penyadaran akan tugas polisi tidak hanya melulu kepada buruh, bisa juga kepada pelaku industri atau stakeholders yang berhubungan dengan perusahaan atau masyarakat sekitar. Dengan demikian maka adanya kesadaran bersama ini akan memunculkan keharmonisan dan keserasian pada peran masing-masing dan adanya pemahaman ini akan menurunkan tensi akibat pemahaman liar pada masing-masing pihak yang semakin dikaburkan dengan agenda media pers yang saat ini kerap melegitimasi sesuatu yang menyimpang. Satu yang harus diakui bahwa polisi memiliki dua wajah sekali, yakni yang angker dan tersenyum. Pada banyak pemberitaan yang ditampilkan adalah muka angker dan seram dari polisi. Dalam artian polisi sangat profesional, tetapi mereka bukan dalam representasi manusia hanya robot saja.

Oleh sebab itu urgensi untuk penerapan *Community Oriented Policing* atau konsep kepolisian berorientasi masyarakat dalam semangat *Public Community Relations* (PGR). Ada tiga komponen penting, yaitu; relasi

masyarakat, pelayanan komunitas dan partisipasi komunitas, pelayanan terbaik bagi komunitas (Suparlan, 2004:248). Dalam penerapannya tentu saja mengurangi konflik dengan polisi memberikan keteladanan dengan mengajukan empati kepada komunitas yang menjadi perhatian. Tentu saja penerapan *community relations* tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi perlu proses yang panjang. Sosialisasi perlu dilakukan pada tingkat pimpinan, karena tentu saja semua tergantung pimpinan yang ada di dalam organisasi tersebut dalam pelaksanaan kerjanya. Tidak lupa untuk memberdayakan anggota dalam keperluan peningkatan pemahaman mereka akan *community relations* terutama pekerjaan *public relations* yang ada.

Dalam mengedepankan kerja *public relations* anggota harus memiliki kepekaan dan pemahaman akan pola perilaku dan tingkah laku dari komunitas yang mereka adakan hubungan dengan mereka. Kemudian dipahami juga potensi konflik yang mungkin terjadi. Kerja kunci *community relations* adalah pembinaan hubungan baik dengan pemuka dari kelompok tersebut, dengan demikian *opinion leader* dapat menularkan gambaran baik polisi di mata komunitas tersebut. Adanya ikatan hubungan dengan polisi tidak akan memberikan sentimen negatif terhadap kerja polisi yang tidak memihak kepada mereka.

Kesimpulan dan Saran

Penerapan *community relations* sebagai upaya pencegahan begitu urgen dalam semangat penerapan keamanan dalam negeri yang saat ini dibenturkan dengan banyaknya konflik yang pecah di daerah. Sebut saja bentrokan buruh, perebutan lahan dan lain-lain. Tidak adanya pendekatan kepada komunitas menyebabkan mereka berbalik menyerang Polri dan ini disebabkan pihak Polri tidak memahami kerja dari pendekatan kepada komunitas. Begitu tingginya konflik di daerah menunjukkan pola

penerapan Perpolisian Masyarakat di Indonesia masih jauh dari diharapkan.

Inti dari tulisan ini menyarankan agar polisi tidak dehumanisasi malah sebaliknya dimanusiakan kembali dengan membina hubungan yang harmonis dengan komunitas yang mungkin menjadi pemicu konflik yang lebih besar di Indonesia ini. Adanya interaksi yang mengedepankan fungsi public relations dengan mengajukan empati akan menggiring polisi kepada penanganan pencegahan komprehensif kasus yang ada. Bukan malah hanya sebagai pemadam kebakaran yang memadamkan api tetapi tidak sampai ke akar-akarnya.

Bibliografi

- “Belasan Buruh Ditangkap Setelah Bentrok di Banten,” (availabel at <http://www.tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2005/12/19/b r k , 2 0 0 5 1 2 1 9 - 7 0 8 3 9 , i d . h t m l> [ditelusur2/6/2013.12.31]).
- Cutlip, Scott. M (2009). *Effective Public Relations*. England : Oxford
- Effendy, Onong Uchjana. 2004. *Ilmu komunikasi teori dan praktek*. Bandung: Rosdakarya.
- Friedmann, Robert R (1992). *Community Policing: comparative perspectives and prospects*. New York: Harvester.
- Griffin, EM . 2009. *A First look at communication theory*.7th.ed New York: Mc Graw Hill.
- “Memaksa demo di depan pabrik, buruh & polisi bentrok,”(diunduh dari <http://daerah.sindonews.com/read/2013/05/22/23/751593/memaksa-demo-di-depan-pabrik-buruh-polisi-bentrok> [ditelusur 28/5/2013.14.30])
- Suhandang, Kustadi. 2004. *Your Public Relations*. Singapore: McMillan.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian
- Tapscott, Kenneth R. [s.t.]. *Police and Effective Communication*. (diunduh dari http://www.articlecity.com/articles/politics_and_government/article_280.shtml [diakses tanggal 21/5/2013. 10.30,33])
- “Unresolved Critical Issue Associated with Policing and Democracy”, (diunduh dari <http://web.mit.edu/gtmarx/www/dempol.html>[diakses tanggal 28/5/2013.13:30]).